



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**JAMBI
MANTAP**



**BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Perubahan Rencana Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2024 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja (*Performance Plan*) merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas dan sebagai pedoman peningkatan kerja bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA BADAN,



Dr. AMRULSYAH

Penata TK I

NIP. 19700107 199101 1 001

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	11
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ...	20
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024	22
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	27
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jambi.....	28

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran	25
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Serta untuk menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2024 yang berkenaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi perencanaan program dan kegiatan dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021 - 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan

dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026

1.2 Landasan Hukum.

Dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005- 2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2024
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024
3. Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2024
4. Kelompok sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024
5. Pagu Indikatif dan Prakiraan maju Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2024

2. Mengevaluasi RENJA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun sebelumnya
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2024
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 juga di evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan Kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 juga memperhatikan hal- hal sebagai berikut ;

- a. Hasil Evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024.
- b. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan RPJMD dan tertuang dalam renstra perangkat daerah.
- c. Prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan dan memantapkan kualitas sumberdaya manusia.

Tabel 2.1 terlihat bahwa ada relaisasi capaian tahun 2022 kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mendekati dari target yang direncanakan. Untuk IKM realisasi sebesar 75,97 dengan persentase target yang di tetapkan sebesar 91.17 %, AKIP ditargetkan sebesar 83.33 dengan predikat (B). Pengelolaan Pendapatan Restribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi capaian sebesar Rp. 723.550.000,- (tujuh ratus dua

puluh tiga ribu rupiah) dari target yang ditetapkan setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.357.350.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase pencapaian 53,30%. Realisasi kegiatan peningkatan Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi naik sebesar 112% dari target 3605 orang tercapai 4033 orang kunjungan ke Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meningkatkan dari target awal sebanyak 12 kali event tercapai 15 event (naik 142 %). Meningkatnya jumlah penyelenggaraan event di dukung dengan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang menjadi lebih baik, rehabilitasi sarana dan prasana anjungan Jambi yaitu ruang rapat, ruang mufakat dan ruang kantor anjungan dengan sasaran untuk memberikan peningkatan program kerja promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata baik di dalam dan luar taman mini indonesia indah.

**Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	80,5	83,3	103,47%	84,33	75,97	90%	85
	Predikat AKIP	60,10 (B)	86,14 (B)	143.33%	B	B	B	B
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Predikat AKIP	60,10 (B)	86,14 (B)	143.33%	B	B	B	B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kontribusi Mess Jambi/PAD (Rp.000)	2.567.000	374.200	14,58%	1.357.350	723.550	26,87%	2.969.032
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM	80,5	83,3	103,47%	84	75,97	90%	85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	80,5	83,3	103,47%	84	75,97	90%	85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	60,10 (B)	86,14 (B)	143.33%	B	B	143,33 %	84
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta	IKM	80,5	83,3	103,47%	84	75,97	91.19 %	85
Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan	IKM	80,5	83,3	103,47%	84	75,97	90%	85
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII (orang)	3500	300	8,57%	3605	4033	112%	3824
	Penyelenggaraan Koordinasi Promosi dan Investasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi (Kali/Event)				12	15	142%	20
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatkan Retribusi Daerah dan Jumlah Kunjungan (Rp.000)	2.567.000	374.200.000	14,58%	1.357.350	723.550	53,30%	2.969.032

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
	Meningkatnya Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi (orang)	3500	300	8,57%	3605	4033	112%	7210

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023.Data Diolah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja indikator perangkat daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Mess Pemerintah Daerah di Jakarta berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha juga berperan sebagai Pelayanan Sosial membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Jumlah Pendapatan Daerah dari Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan dan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Jakarta pada tahun 2022, target penerimaan setelah perubahan sebesar Rp. 1.357.350.000,- sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp.723.550.000,- artinya realisasi target baru tercapai 53.30%.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2025	2021	2022	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. IKM	83,3	84	84,5	85,5	83,3	75,91	84,5	85,5
		2. Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B	B	B
2.	Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatkan Retribusi Daerah dan Jumlah Kunjungan (Rp.000)	2.567.000	1.357.350	2.827.000	3.117.484	374.200	723.550	3.193.000	3.117.484
3.	Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Penyelenggaraan Koordinasi Promosi dan Investasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi (kali/event)	-	12	15	25	-	17	15	25

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023.Data Diolah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih terdapat kendala dan hambatan antara lain :

- a. Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disebabkan karena penginapan/hotel yang berada di sekitar yang memiliki fasilitas yang memiliki nilai jual lebih tinggi, harga yang kompetitif. Standar akomodasi yang ditetapkan dalam anggaran perjalanan dinas yang menggunakan dana APBD yang berbeda cukup tinggi sehingga menjadi pilihan dalam menginap
- b. Sinkronisasi dan sinergisitas kegiatan Promosi Budaya Daerah yang belum optimal di lintas kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk promosi ditingkat nasional berbasis digital.
- c. Sarana dan Prasarana yang berbasis teknologi tinggi atau digitalisasi yang belum tersedia/terpenuhi secara maksimal
- d. Kompetensi dan ketrampilan sumberdaya manusia yang belum memiliki sertifikasi baik itu formal maupun non formal.
- e. Budaya kerja aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang belum berbasis kinerja.

Mengamanatkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok, fungsi dan wewenangya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
- c. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatik dan instansi lainnya;
- d. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat pemerintah daerah dan tamu daerah di Jakarta;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah;
- f. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Jambi kepada yang memerlukannya;
- g. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional
- h. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Jambi di Jakarta dan sekitarnya;
- i. Koordinasi pengelolaan Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor .
- k. Mengelola mess Pemerintah Provinsi-Jambi di Jakarta .
- l. Mengelola asset pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

- a. Penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;
- b. Pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/luar daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. Pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. Pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Cidurian no. 15-17 Cikini, dan Asrama Mahasiswa Jambi di Sentiong Kwitang Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 disamping mempunyai seorang Kepala Badan , juga membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Kepala sub Bagian Tata Usaha

Kasubbag Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata naskah dinas, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian surat menyurat dan pengadaan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi kenaikan pangkat, pelatihan, disiplin pegawai ASN, mutasi, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pensiun (TASPEN) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Pelaksanaan evaluasi kehadiran dan penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan;

- d. Pengusulan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai ASN;
- e. Pembuatan daftar urut kepangkatan;
- f. Pembuatan data base pegawai sesuai administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- g. Perencanaan urusan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- h. Perencanaan dan pengelolaan perpustakaan;
- i. Pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengevaluasi program kerja;
- j. Pemantauan dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan;
- k. Pelaksanaan dan penyiapan laporan dan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala sub Bidang Pengelolaan Mess dan Aset

Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset mempunyai tugas pokok mengelola mess Jambi dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengevaluasi standar operasional pelayanan mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- b. Penata dan penginventarisir sarana dan prasarana mess dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengambil langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan mess dan aset pemerintah provinsi di di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;

- d. Pelaksanaan urusan promosi mess Jambi, peningkatan pelayanan dengan sistem pelaporan penerimaan mess; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga

Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan, kehumasan, akomodasi, transportasi, hubungan antar lembaga pemerintah provinsi, lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan program kerja kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- e. Pengurusan, penyiapan kelengkapan administrasi dan perjalanan gubernur, wakil gubernur, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non-departemen), swasta dan internasional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam

- hubungan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi Jambi;
- h. Pemberian bantuan kepada para pejabat pemerintah provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non-departemen), swasta dan internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
 - i. Pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi tentang masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Kasubbid Promosi Informasi dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar taman mini Indonesia indah;
- d. Pengkoordinasi kegiatan anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi, meliputi bidang ekonomi, sosial,

- budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar taman mini Indonesia indah;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program dan informasi pembangunan daerah serta pengelolaan anjungan jambi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pada RENJA Tahun 2022, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 untuk 2 Program, 9 Kegiatan dan 13 sub kegiatan, dengan total pagu murni Rp 15.954.649.677 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enm ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dalam rangka melaksanakan rasionalisasi anggaran selanjutnya mengalami perubahan sebesar Rp. 295.553.985 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Rp. 15.695.095.692 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Realisasi keuangan s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.324.56.616,00 (97,86%), persentase fisik 100 persen, sisa anggaran yang tidak diserap Rp 334.549.076,00. Sisa anggaran ini tidak terserap terdiri dari sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN karena ada ada 2 (dua) orang aparatur pegawai yang telah pensiun dan 1 (satu) orang aparatur pindah tugas ke Jambi dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Untuk kegiatan administrasi kegiatan Tugas ASN terdapat efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 25.747.434. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemelihara dan biaya pajak kendaraan sudah dilakukan sesuai kebutuhan sehingga terdapat silpa dari kegiatan

tersebut sebesar Rp. 43.255.705 (11.15 %). Kegiatan fasilitasi promosi produksi unggulan dan pelestarian seni budaya juga mengalami efisiensi sebesar Rp. 9.861.495 (1,4 %).

Pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilakukan review mengenai realisasi anggaran sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses kebutuhan dan target kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2024 yang pada tahun sebelumnya tidak teranggarkan.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Predikat AKIP	B	19.385.549.909	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Predikat AKIP	B	25.020.263.694	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 dokumen	20.000.000	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	7.027.122.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	9.111.876.078	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah	100%	205.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah	100%	431.517.000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	36.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	137.000.000	
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian	100%	3.192.334.324	Administrasi Umum Perangkat	Jakarta	Persentase penyelesaian	100%	3.143.626.246	

			pelayanan administrasi umum			Daerah		pelayanan administrasi umum			
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.488.411	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.884.143.102	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	2.988.805.323	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	3.742.27.525	
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	5.677.475.791	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	5.549.873.742	
2.	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	100%	1.329.556.142	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	100%	1.979.104.095	
2.1.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	100%	1.329.556.142	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	100%	1.979.104.095	

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023 Data Diolah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan. Pelaksanaan program sebagai upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan Badan Penghubung untuk Tahun 2024 mengacu pada Prioritas Pembangunan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Predikat AKIP	23.740.179.527	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	20.000.000	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	9.111.876.078	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah	469.497.000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	137.000.000	
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	2.713.365.785	
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jakarta	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.084.143.102	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	3.654.423.820	
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jakarta	Persentase penyelesaian	5.549.873.742	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintah Daerah		pemeliharaan barang milik daerah		
2.	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	1.996.840.095	
2.1.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	1.996.840.095	

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023 Data Diolah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN IV (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan bidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujuk pada landasan ideologis dan konstitusional negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat

monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berangkat dari Misi 1 (satu) dari 3 (tiga) Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yakni menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”, maka tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diambil dari Tujuan 1 (satu) dari 3 (tiga) Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas” dengan demikian tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas
2. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) dari 14 (empat belas) sasaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026, yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Dengan demikian sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
2. Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi

Sasaran 1 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dengan indikator sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya sasaran 2 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi, dengan indikator sasaran meningkatkan Retribusi Daerah dan Jumlah Kunjungan.

Untuk jelasnya Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -	
						2023	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM (nilai)	-	-	75,91	84,5	85,5
			1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Predikat AKIP		B	B
2.	Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Penyelenggaraan Koordinasi Promosi dan Investasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi (kali/event)	-	-	17	15	25
			2. Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatkan Retribusi Daerah dan Jumlah Kunjungan (Rp.000)	723.550	3.193.000	3.117.484

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023.Data Diolah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tetap mengacu pada Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Keseluruhan program maupun kegiatan diupayakan untuk mengakomodir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 62 Tahun 2016 fokus pada aspek Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Jambi yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola mess Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta. Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Ranwal Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, seperti tertera pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jambi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	Jakarta		24.132.459.989	APBD			26.545.705.987
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Jakarta	15 dokumen	20.000.000	APBD		15 dokumen	22.000.000
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jakarta	11 dokumen	10.000.000	APBD		11 dokumen	11.000.000
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Jakarta	4 dokumen	10.000.000	APBD		4 dokumen	11.000.000
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Jakarta	100%	9.111.876.078	APBD		100%	10.023.063.686
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (bulan)	Jakarta	14 bulan	8.527.294.828	APBD		14 bulan	9,380,024,311
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan	Jakarta	12 bulan	584.581.250	APBD		12 bulan	643,039,375

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Barang/Jasa							
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah	Jakarta	100%	431.517.000	APBD		100%	474.668.700
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung	Jakarta	2 kali	431.517.000	APBD		2 kali	474.668.700
5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pembayaran Pengurusan IMB Gedung	Jakarta	-	-	APBD		-	-
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	Jakarta	100%	137.000.000	APBD		100%	150,700,000
5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jakarta	110 stel	77.000.000	APBD		115 stel	84,700,000
5.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Jakarta	12 orang	60.000.000	APBD		12 orang	66,000,000
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	Jakarta	100%	3.143.626.246	APBD		100%	3.457.988.871
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen	Jumlah Jenis	Jakarta	13 Jenis	72.418.987	APBD		13 jenis	79,660,886

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor							
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jakarta	44 jenis	448.786.460	APBD		44 jenis	493.665.106
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan bahan logistik kantor	Jakarta	30.000org /tamu	1.747.094.999	APBD		30.000org /tamu	1.921.804.499
5.07.07.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	25 jenis	37.221.800	APBD		25 jenis	40.943.980
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jakarta	2 jenis	-	APBD		2 jenis	-
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	Jakarta	1000org /tamu	-	APBD		1000org /tamu	-
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan kunsultasi dalam dan luar daerah	Jakarta	950 kali	838.104.000	APBD		950 kali	921.914.400
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	100%	2.084.143.102	APBD		100%	2.292.557.412
5.07.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Jakarta	2 unit	1.800.000.000	APBD		2 unit	1.980.000.000
5.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jakarta	4 jenis	114.971.450	APBD		4 jenis	126.468.595

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jakarta	4 jenis	169.171.652	APBD		4 jenis	186.088.817
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jakarta	100%	3.654.423.820	APBD		100%	4.019.866.202
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat dan barang keluar daerah	Jakarta	21 kali	59.156.295	APBD		21 kali	65.071.925
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	Jakarta	12 bulan	1.753.533.497	APBD		12 bulan	1.928.886.846
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian tabung gas	Jakarta	7 kali	134.956.756	APBD		7 kali	148.452.431,20
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Jakarta	12 bulan	1.706.777.273	APBD		12 bulan	1.877.455.000
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	Jakarta	100%	5.549.873.742	APBD		100%	6.104.861.116
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Jakarta	-		-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Jakarta	23 unit	1.496.789.096	APBD		23 unit	1.646.468.005,60
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Jakarta	5 unit	698.554.646	APBD		5 unit	768.410.110
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jakarta	4 unit	3.354.530.000	APBD		4 unit	3.689.983.000
5.07.02	II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal	Jakarta	100%	1.979.104.095	APBD		100%	2.177.014.505
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	Jakarta		1.979.104.095	APBD			2.177.014.505
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Apartur dan Masyarakat	Jumlah periode kegiatan Pelayanan Publik Bagi Apartur dan Masyarakat	Jakarta	1 tahun	-	APBD		1 tahun	-
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Sarasehan dan sosialisasi yang dilaksanakan	Jakarta	5 kali	707.818.400	APBD		7 kali	778.600.240
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Seni Budaya (event)	Jakarta	20 kali	1.271.285.695	APBD		20 kali	1.398.414.265

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	2 kali	-	APBD		2 kali	-
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	1 kali	-	APBD		1 kali	-
					26.111.564.084				28.722.720.492

Sumber : Bapegdaprovjambi.2023. Data Diolah.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan yang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Ranwal Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022.

Dengan adanya Ranwal Rencana Kerja 2024 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari perwujudan tujuan dan sasaran Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.